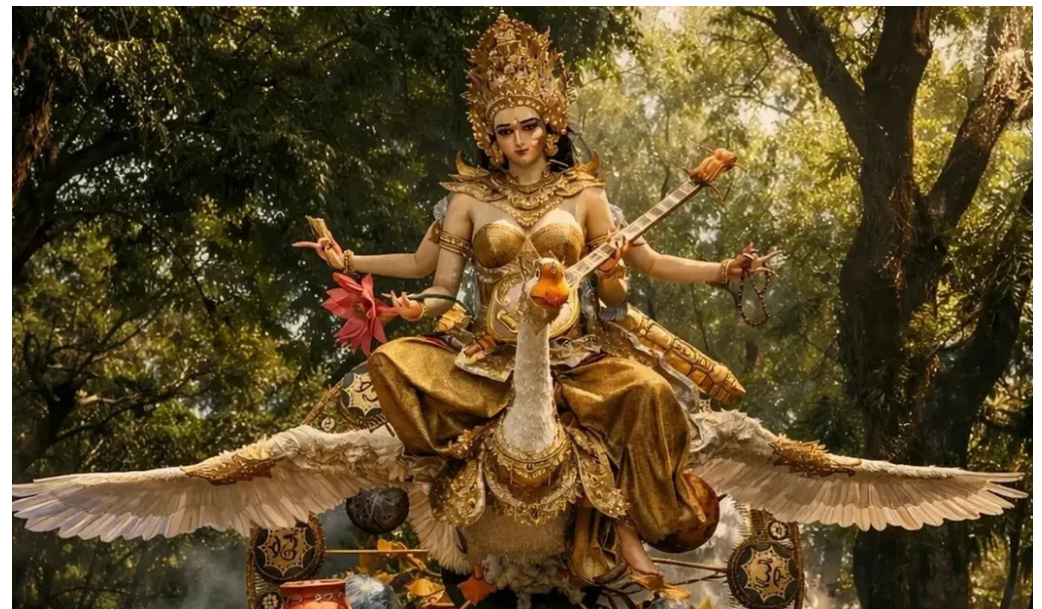




TAHUN
2026

DOKUMEN PENGELOLA RISIKO

DINAS KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya sehingga kami dapat menyelesaikan kertas kerja Pengelolaan Risiko pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2026. Kertas kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para Stakeholder, sebagai pertimbangan dalam pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengelolaan risiko dilakukan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah. Kertas kerja ini memuat penetapan risiko strategis, penetapan risiko operasional, proses analisis risiko, rencana kegiatan pengendalian risiko yang ada di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Penyusunan kertas kerja ini telah memperhatikan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kertas kerja ini. Selanjutnya, kami berharap agar kertas kerja ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik.

Om Santih, Santih, Santih Om.

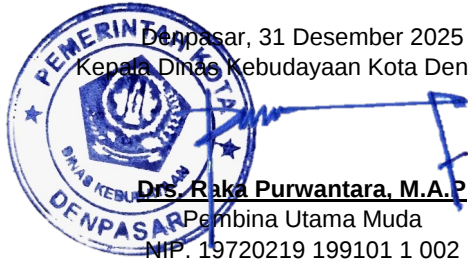


Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,

Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197202191991011002

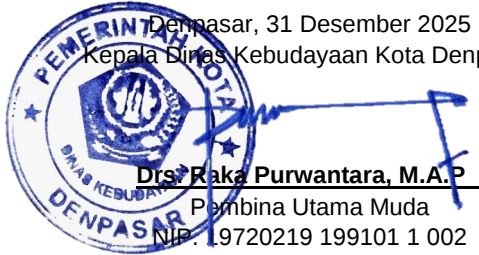
Form 2.b
Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali		
Penilaian Tahun	:	2026		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	:	Dinas Kebudayaan		
Sumber Data	:	Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025 - 2029		
Tujuan Strategis	:	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar		
Sasaran Strategis	:	1. Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan 2. Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan 3. Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan 4. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan		
IKU Renstra OPD	No	IKU		Target
	1	Persentase Capaian Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		21,9%
	2	Persentase Capaian Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		44,4%
	3	Persentase Capaian Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		85,6%
	4	Persentase Capaian Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		47,5%
Informasi Lain				
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan strategis: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan 2. Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan 3. Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan 4. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan IKU Strategis: 1. Persentase Capaian Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 2. Persentase Capaian Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 3. Persentase Capaian Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 4. Persentase Capaian Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan strategis: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan IKU Strategis: Persentase Capaian Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan strategis: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan IKU Strategis: Persentase Capaian Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan strategis: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan IKU Strategis: Persentase Capaian Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)		

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis: Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan IKU Strategis: Persentase Capaian Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  Drs. Raka Purwantara, M.A.P. Pembina Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002	

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:	2026		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Sumber Data	:	Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar			
Program (Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target	
	1	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20%	
	2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20%	
	3	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah	20%	
	4	Persentase Pelaksanaan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20%	
	5	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	20%	
Informasi lain				
Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 4. Persentase Pelaksanaan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah			

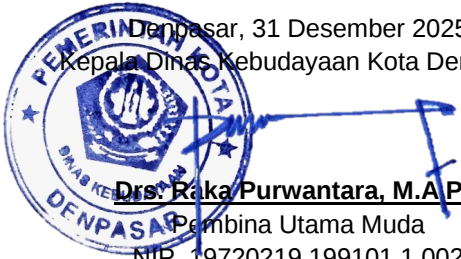


Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720219 199101 1 002

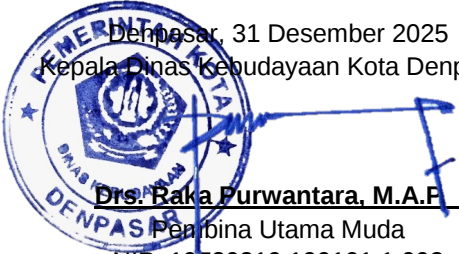
Form 2.c.1
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:	2026		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Sumber Data	:	Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar			
Program (Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026)	Program Pengembangan Kebudayaan			
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target	
	1	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan	20%	
	2	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Kesenian Tradisional	20%	
	3	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat	20%	
Informasi lain				
Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan Persentase Pelaksanaan Pelestarian Kesenian Tradisional Persentase Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat			
 Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Drs. Raka Purwantara, M.A.P. Pembina Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002				

Form 2.c.2
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:	2026		
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Sumber Data	:	Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar			
Program (Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026)	Program Pembinaan Sejarah			
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target	
	1	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	20%	
Informasi lain				
Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			
 Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar <u>Drs. Raka Purwantara, M.A.P</u> Pembina Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002				

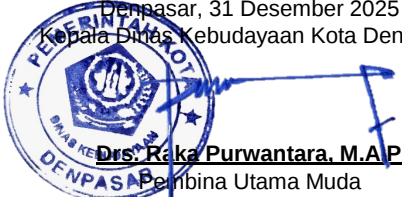
Form 2.c.3
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
Sumber Data	: Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar		
Program (Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2026)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	20%
	2	Persentase Pelaksanaan Cagar Budaya Kota yang dikelola	20%
Informasi lain			
Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota 2. Persentase Pelaksanaan Cagar Budaya Kota yang dikelola		
 Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar <u>Drs. Raka Purwantara, M.A.P.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002			

Form 3.a
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Dinas Kebudayaan
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang dinilai : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029
 Urusan Pemerintahan : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar

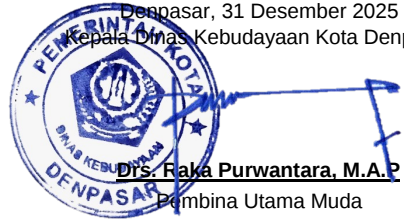
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Tujuan Strategis Pemda : Meningkatkan Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya Bali										
	Sasaran : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan									
	Program: Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	RSP.26.22.01.21	Kepala Daerah	Keterbatasan SDM dalam pengelolaan kegiatan pengembangan kebudayaan secara profesional	Internal	C	Tidak tercapainya target sasaran	Pemerintah Kota Denpasar
	Program : Pembinaan Sejarah	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Tidak optimalnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan hasil tinjauan sejarah lokal	RSP.26.22.01.22	Kepala Daerah	Penggunaan media dalam pemberian informasi terhadap hasil tinjauan sejarah lokal belum optimal	Internal	C	Tidak tercapainya target sasaran	Pemerintah Kota Denpasar
	Program : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	Tidak optimalnya pelestarian warisan budaya yang dilestarikan	RSP.26.22.01.23	Kepala Daerah	Kurangnya data warisan budaya sebagai dasar pelestarian budaya	Internal	C	Tidak meratanya pelestarian warisan budaya yang ada di Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Tidak optimalnya pengelolaan cagar budaya dan WBTB	RSP.26.22.01.24	Kepala Daerah	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan cagar budaya dan WBTB	Internal	C	Kurang Optimalnya respon/partisipasi masyarakat dalam pengusulan penetapan Cagar Budaya dan WBTB	Pemerintah Kota Denpasar
			Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi/golongan terhadap pemilihan pihak ketiga	RF.26.22.01.21	Kepala Daerah	Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang agar pihak ketiga tertentu terpilih dalam setiap kegiatan	Internal	C	Kerusakan Reputasi dan Kepercayaan Publik	Pemerintah Kota Denpasar

Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720219 199101 1 002

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali
 Nama OPD : Dinas Kebudayaan
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar									
1	Sasaran: Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan	Persentase capaian pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Tidak tercapainya target pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.01	Kepala Dinas Kebudayaan	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya misi ke- V Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan
2	Sasaran: Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Persentase capaian pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Tidak tercapainya target pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.02	Kepala Dinas Kebudayaan	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya misi ke- V Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan
3	Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan	Persentase capaian pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Tidak tercapainya target pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.03	Kepala Dinas Kebudayaan	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya misi ke- V Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan
4	Sasaran: Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan	Persentase capaian pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Tidak tercapainya target pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.04	Kepala Dinas Kebudayaan	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya misi ke- V Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan

Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720219 199101 1 002

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali Nama OPD : Dinas Kebudayaan Tahun Penilaian : 2026 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar Sasaran Strategis OPD : 1. Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan 2. Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan 3. Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan 4. Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan											
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Adanya keterlambatan pemberian gaji karena administrasi pendukung yang kurang lengkap (dalam hal ASN yang mengalami kenaikan pangkat)	ROO. 26.22.19.01	Sekretariat	SK kenaikan pangkat yang terlambat sehingga proses administrasi menunggu SK turun	Eksternal	C	Gaji bagi ASN yang mengalami kenaikan pangkat menjadi tertunda	ASN Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	ROO. 26.22.19.02	Sekretariat	Kesalahan perhitungan dalam pembuatan daftar gaji	Eksternal	C	Terganggunya proses pembayaran gaji pegawai	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Pernyataan palsu pegawai terkait tunjangan yang diterima	RF.26.22.19.01	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	Kerugian Keuangan Daerah	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.22.19.02	Sekretariat	Kurang tertibnya alur pelaporan pegawai kepada Bendahara Gaji terkait status tunjangan anak	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan rutin	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Anggaran yang kurang untuk memenuhi logistik kantor	ROO. 26.22.19.03	Sekretariat	Kebutuhan melebihi anggaran yang ada	Eksternal	C	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyuiap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.26.22.19.03	Sekretariat	Kemungkinan terjadinya suap menyuiap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.26.22.19.04	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah	Pelaksanaan	Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal perencanaan	ROO. 26.22.19.04	Sekretariat	Pengadaan Belanja Modal dilaksanakan melalui E-Katalog dan tidak semua barang ada etalase di E-Katalog atau spek barang yang dicari tidak ada di E-Katalog	Eksternal	C	Terhambatnya proses pengadaan barang	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Pengadaan aset baru secara fiktif yaitu melakukan pengadaan dengan bukti barang yang tidak dibeli atau bukti barang yang lama	RF.26.22.19.05	Sekretariat	Adanya keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam pelaksanaan pengadaan barang oleh pejabat yang berwenang	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RF.26.22.19.06	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Keterlambatan membayar tagihan listrik, telepon, air, membayar gaji pegawai, dan iuran BPJS	ROO. 26.22.19.05	Sekretariat	1. Daftar amprahan gaji yang terlambat di tanda tangan sehingga menghambat proses administrasi dan kadaluarsanya cetakan tagihan pada aplikasi simponi 2. DPA terlambat ditetapkan di awal tahun sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran listrik, air, telepon	Internal dan Eksternal	C	Terlambatnya membayar gaji pegawai, iuran BPJS Kesehatan dan pembayaran listrik, air, telepon	Pegawai Non ASN Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan / keadaan yang sebenarnya	RF.26.22.19.07	Sekretariat	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.26.22.19.08	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Realisasi anggaran kegiatan tidak bisa terealisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah dirancang	ROO. 26.22.19.06	Sekretariat	Kerusakan barang tidak dapat diprediksi/ tidak dapat ditentukan kapan barang tersebut harus dilakukan service	Eksternal	C	Serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.26.22.19.09	Sekretariat	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.26.22.19.10	Sekretariat	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program: Pengembangan										
	Kegiatan: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan	Pelaksanaan	Terjadinya hujan pada saat pelaksanaan pembukaan bulan bahasa bali	ROO. 26.22.19.07	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kegiatan Pembukaan bulan bahasa bali dilakukan di luar ruangan	Internal dan Eksternal	C	Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali kurang maksimal	Dinas Kebudayaan, Undangan, Pengisi Acara dan Peserta
				Kurangnya minat pemilik Lontar untuk dilakukan Pelindungan/Pembersihan Lontar	ROO. 26.22.19.08	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kurangnya Sosialisasi terkait pelindungan lontar	Internal dan Eksternal	C	Banyaknya lontar yang rusak	Dinas Kebudayaan dan pemilik lontar
				Rendahnya minat peserta dalam mengikuti pelatihan Pelindungan Bahasa Bali	ROO. 26.22.19.09	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kurangnya minat peserta dalam mengikuti pelatihan Pelindungan Bahasa Bali	Internal dan Eksternal	C	Kurangnya pengetahuan terhadap bahasa, sastra dan aksara bali dalam masyarakat	Dinas Kebudayaan dan masyarakat
			Pelaksanaan	Nilai capaian Borang evaluasi PPKD menurun	ROO. 26.22.19.10	Sekretariat	Tidak terlaksananya rekomendasi yang ada di dalam rekomendasi PPKD	Internal dan Eksternal	C	Menurunnya kinerja Pemerintah Kota di Urusan Kebudayaan	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyuiap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.11	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kemungkinan terjadinya suap menyuiap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.12	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Kegiatan: Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pelestarian Kesenian Tradisional	Pelaksanaan	Tidak dapat menentukan dengan pasti waktu pelaksanaan Pementasan Kesenian Hari-Hari Tertentu	ROO. 26.22.19.11	Bidang Kesenian	Tidak pastinya waktu Pelaksanaan Pementasan Kesenian Hari-Hari Tertentu	Eksternal	C	Tidak tercapainya target penyelenggaraan Pementasan Kesenian Hari-Hari Tertentu	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Sulitnya memfasilitasi peserta lomba Parade Baleganjur Gerak	ROO. 26.22.19.12	Bidang Kesenian	Keterbatasan anggaran bagi peserta yang ingin mengikuti lomba sehingga terkendala biaya latihan	Internal	C	antusiasme generasi muda untuk melestarikan seni Baleganjur bisa terancam	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Minimnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional (Seni Angklung, Selonding, Gambang, Gambuh dan Semara Pegulingan)	ROO. 26.22.19.13	Bidang Kesenian	Kurangnya ruang pembelajaran dan dukungan kebijakan yang konkret untuk revitalisasi seni di tingkat komunitas.	Internal dan Eksternal	C	Terancam punahnya warisan budaya khususnya pada kesenian tradisional	Dinas Kebudayaan

[illegible]

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Kegiatan: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak dapat menentukan dengan pasti waktu pelaksanaan Lomba Film Dokumenter (Perjalanan Dinas)	ROO. 26.22.19.19	Bidang Sejarah dan Dokumentasi	Pelaksanaan mengikuti arahan dari pihak penyelenggara Lomba Film Dokumenter (Perjalanan Dinas)	Eksternal	C	Pelaksanaan Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.17	Bidang Sejarah dan Dokumentasi	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.18	Bidang Sejarah dan Dokumentasi	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Program: Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya										
	Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	Perencanaan	Adanya pergeseran nilai budaya terhadap Warisan Budaya Tak Benda	ROO. 26.22.19.20	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Pengaruh budaya global dan perubahan gaya hidup masyarakat	Internal dan Eksternal	C	Banyaknya Warisan Budaya Tak Benda yang tidak dapat dipertahankan atau dilestarikan keberadaannya	Dinas Kebudayaan
			Perencanaan	Adanya perubahan destruktif (perubahan bentuk fisik akibat aktifitas manusia)	ROO. 26.22.19.21	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya	Internal dan Eksternal	C	Banyaknya Cagar Budaya yang berubah bentuk dan berubah fungsi	Dinas Kebudayaan
			Perencanaan	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.19	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar
			Perencanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.20	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Cagar Budaya Kota yang dikelola	Perencanaan	Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar sebagian besar masih difungsikan	ROO. 26.22.19.22	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kurangnya pemahaman pemilik akan pentingnya inventarisasi	Eksternal	C	Banyaknya Objek Cagar Budaya yang belum terdata, teridentifikasi, dan didokumentasikan dengan baik	Dinas Kebudayaan
			Pelaksanaan	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya	RF.26.22.19.21	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	Kemungkinan terjadinya suap menyuap agar pihak ketiga (Rekanan) terpilih dalam merealisasi pengadaan belanja Barang dan Jasa	Internal dan Eksternal	C	Kerugian Keuangan Negara	Pemerintah Kota Denpasar

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/ UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya	RF.26.22.19.22	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Kebudayaan



Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720219 199101 1 002

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali			
Tahun Penilaian		: 2026			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	RSP.26.22.01.21	3	3	9
2	Tidak optimalnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan hasil tinjauan sejarah lokal	RSP.26.22.01.22	3	3	9
3	Tidak optimalnya pelestarian warisan budaya yang dilestarikan	RSP.26.22.01.23	3	3	9
4	Tidak optimalnya pengelolaan cagar budaya dan WBTB	RSP.26.22.01.24	3	3	9
II	Risiko Fraud Pemda				
5	Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi/golongan terhadap pihak ketiga	RF.26.22.01.21	4	3	12
III	Risiko Strategis OPD				
6	Tidak tercapainya target perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.01	4	4	16
7	Tidak tercapainya target pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.02	4	4	16
8	Tidak tercapainya target pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.03	4	4	16
9	Tidak tercapainya target pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.04	4	4	16
IV	Risiko Operasional OPD				
10	Terjadinya perwakilan pemain yang sama tiap tahunnya dalam pementasan Drama Gong Duta Kota Denpasar pada Kegiatan PKB Tingkat Provinsi Bali	ROO. 26.22.19.14	3	3	9
11	Terjadinya kesalahan dalam penentuan pemenang lomba	ROO. 26.22.19.15	3	3	9
12	Sulitnya memfasilitasi peserta lomba Parade Baleganiur Gerak	ROO. 26.22.19.12	2	3	6

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
13	Minimnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional (Seni Angkulng, Selonding, Gambang, Gambuh dan Semara Pegulingan)	ROO. 26.22.19.13	2	3	6
14	Tidak sesuaiya Realisasi anggaran kegiatan dengan anggaran kas	ROO. 26.22.19.16	1	4	4
15	Terjadinya hujan pada saat pelaksanaan pembukaan bulan bahasa bali	ROO. 26.22.19.07	1	3	3
16	Kurangnya minat pemilik Lontar untuk dilakukan Pelindungan/Pembersihan Lontar	ROO. 26.22.19.08	1	3	3
17	Rendahnya minat peserta dalam mengikuti pelatihan Pelindungan Bahasa Bali	ROO. 26.22.19.09	1	3	3
18	Tidak dapat menentukan dengan pasti waktu pelaksanaan Pementasan Kesenian Hari-Hari Tertentu	ROO. 26.22.19.11	1	3	3
19	Sulitnya menemukan atlet jantra yang kompeten	ROO. 26.22.19.17	1	3	3
20	Cuaca dan tempat yang kurang memadai	ROO. 26.22.19.18	1	3	3
21	Tidak dapat menentukan dengan pasti waktu pelaksanaan Lomba Film Dokumenter (Perjalanan Dinas)	ROO. 26.22.19.19	1	3	3
22	Adanya pergeseran nilai budaya terhadap Warisan Budaya Tak Benda	ROO. 26.22.19.20	1	3	3
23	Adanya perubahan destruktif (perubahan bentuk fisik akibat aktifitas manusia)	ROO. 26.22.19.21	1	3	3
24	Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar sebagian besar masih difungsikan	ROO. 26.22.19.22	1	3	3
25	Nilai capaian Borang evaluasi PPKD menurun	ROO. 26.22.19.10	1	1	1
26	Adanya keterlambatan pemberian gaji karena administrasi pendukung yang kurang lengkap (dalam hal ASN yang mengalami kenaikan pangkat)	ROO. 26.22.19.01	1	1	1
27	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	ROO. 26.22.19.02	1	1	1
28	Anggaran yang kurang untuk memenuhi logistik kantor	ROO. 26.22.19.03	1	1	1
29	Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal perencanaan	ROO. 26.22.19.04	1	1	1
30	Keterlambatan membayar tagihan listrik, telepon, air, membayar gaji pegawai, dan iuran BPJS	ROO. 26.22.19.05	1	1	1
31	Realisasi anggaran kegiatan tidak bisa terealisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah dirancang	ROO. 26.22.19.06	1	1	1
IV	Risiko Fraud OPD				

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
32	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.13	3	1	3
33	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah kepada masyarakat di Bidang Kesenian	RF.26.22.19.14	1	1	1
34	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.15	1	1	1
35	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah dan BKK kepada masyarakat di Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	RF.26.22.19.16	1	1	1
36	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.17	1	1	1
37	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.18	1	1	1
38	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.19	1	1	1
39	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.20	1	1	1
40	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya	RF.26.22.19.21	1	1	1

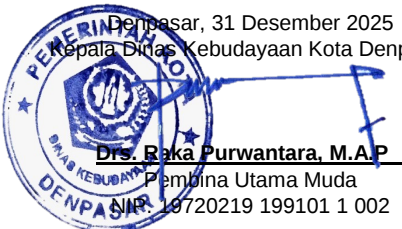
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
41	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya	RF.26.22.19.22	1	1	1
42	Pernyataan palsu pegawai terkait tunjangan yang diterima	RF.26.22.19.01	1	1	1
43	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.22.19.02	1	1	1
44	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.26.22.19.03	1	1	1
45	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.26.22.19.04	1	1	1
46	Pengadaan aset baru secara fiktif yaitu melakukan pengadaan dengan bukti barang yang tidak dibeli atau bukti barang yang lama	RF.26.22.19.05	1	1	1
47	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RF.26.22.19.06	1	1	1
48	Mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan / keadaan yang sebenarnya	RF.26.22.19.07	1	1	1
49	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.26.22.19.08	1	1	1
50	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.26.22.19.09	1	1	1
51	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.26.22.19.10	1	1	1
52	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.11	1	1	1

Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
53	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.12	1	1	1
Denpasar, 31 Desember 2025 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  <u>Drs. Raka Purwantara, M.A.P</u> Pembina Utama Muda NIP. 19720219 199101 1 002					

Form 5
Daftar Risiko Prioritas OPD

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan	: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali : 2026 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
--	---

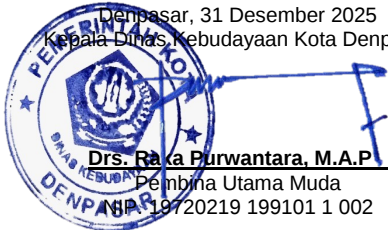
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
II	Risiko Strategis OPD					
1	Tidak tercapainya target perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.01	16	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Tidak tercapainya misi ke- V Kota Denpasar
2	Tidak tercapainya target pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.02	16	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Tidak tercapainya misi ke- V Kota Denpasar
3	Tidak tercapainya target pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.03	16	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Tidak tercapainya misi ke- V Kota Denpasar
4	Tidak tercapainya target pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.04	16	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Tidak tercapainya misi ke- V Kota Denpasar
III	Risiko Operasional OPD					



Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Drs. Raka Purwantara, M.A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720219 199101 1 002

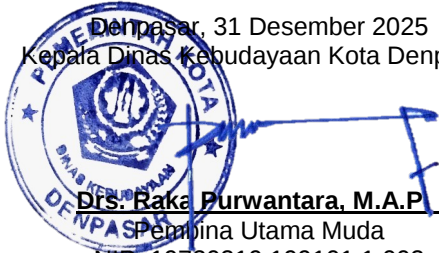
Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan OPD
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) OPD

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali : 2026 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
II Risiko Strategis OPD							
1	Tidak tercapainya target perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO. 26.22.19.01	Dokumen RPJMD, Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, PPKD	Kurangnya pendataan terkait kegiatan perlindungan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Mendata kegiatan perlindungan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV
2	Tidak tercapainya target pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO. 26.22.19.02	Dokumen RPJMD, Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, PPKD	Kurangnya pendataan terkait kegiatan pengembangan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Mendata kegiatan pengembangan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV
3	Tidak tercapainya target pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO. 26.22.19.03	Dokumen RPJMD, Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, PPKD	Kurangnya pendataan terkait kegiatan pemanfaatan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Mendata kegiatan pemanfaatan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV
4	Tidak tercapainya target pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO. 26.22.19.04	Dokumen RPJMD, Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, PPKD	Kurangnya pendataan terkait kegiatan pembinaan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Mendata kegiatan pembinaan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV
III Risiko Operasional OPD							

Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720219 199101 1 002

Form 8
Rencana dan Realisasi Atas Pengkomunikasian Atas Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali					
Tahun Penilaian		: 2026					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemda							
II Risiko Strategis OPD							
1	Tidak tercapainya target perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Rapat/ Koordinasi bersama stakeholders	Perangkat Daerah Terkait	Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV	-	
2	Tidak tercapainya target pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Rapat/ Koordinasi bersama stakeholders	Perangkat Daerah Terkait	Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV		
3	Tidak tercapainya target pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Rapat/ Koordinasi bersama stakeholders	Perangkat Daerah Terkait	Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV		
4	Tidak tercapainya target pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Rapat/ Koordinasi bersama stakeholders	Perangkat Daerah Terkait	Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV		
III Risiko Operasional OPD							



Denpasar, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
Drs. Raka Purwantara, M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720219 199101 1 002

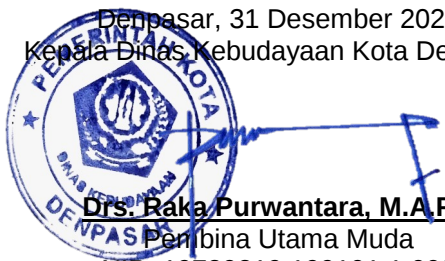
Form 9
Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali					
Tahun Penilaian	: 2026					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
II	Risiko Strategis OPD					
1	Tidak tercapainya target perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Konfirmasi dan pemantauan berkelanjutan	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV	Triwulan I, II, III, IV	
2	Tidak tercapainya target pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Konfirmasi dan pemantauan berkelanjutan	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV	Triwulan I, II, III, IV	
3	Tidak tercapainya target pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Konfirmasi dan pemantauan berkelanjutan	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV	Triwulan I, II, III, IV	
4	Tidak tercapainya target pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Konfirmasi dan pemantauan berkelanjutan	Kepala Dinas Kebudayaan	Triwulan I, II, III, IV	Triwulan I, II, III, IV	
III	Risiko Operasional OPD					

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



Drs. Raka Purwantara, M.A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720219 199101 1 002

Form 10
Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Even) dan Pelaksanaan RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali								
Tahun Penilaian		: 2026								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	RSP.26.22.01.21	-	Keterbatasan SDM dalam pengelolaan kegiatan pengembangan kebudayaan secara profesional	Tidak tercapainya target sasaran		Membuat sosialisai terkait kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Menyebarkan informasi kegiatan melalui sosial media	Triwulan I, II, III, IV	-	
2	Tidak optimalnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan hasil tinjauan sejarah lokal	RSP.26.22.01.22	-	Penggunaan media dalam pemberian informasi terhadap hasil tinjauan sejarah lokal belum optimal	Tidak tercapainya target sasaran		Memaksimalkan media elektronik maupun media cetak yang dimiliki untuk memberikan edukasi kepada masyarakat	Triwulan I, II, III, IV	-	
3	Tidak optimalnya pelestarian warisan budaya yang dilestarikan	RSP.26.22.01.23	-	Kurangnya data warisan budaya sebagai dasar pelestarian budaya	Tidak meratanya pelestarian warisan budaya yang ada di Kota Denpasar		Memaksimalkan pendataan dan memetakan upaya -upala pelestarian warisan budaya di Kota Denpasar	Triwulan I, II, III, IV	-	
4	Tidak optimalnya pengelolaan cagar budaya dan WBTB	RSP.26.22.01.24	-	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan cagar budaya dan WBTB	Kurang Optimalnya respon/partisipasi masyarakat dalam pengusulan penetapan Cagar Budaya dan WBTB		Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Cagar Budaya dan WBTB pada masyarakat	Triwulan I, II, III, IV	-	
II	Risiko Fraud Pemda									
5	Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi/golongan terhadap pemilihan pihak ketiga	RF.26.22.01.21	-	Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang agar pihak ketiga tertentu terpilih dalam setiap kegiatan	Kerusakan Reputasi dan Kepercayaan Publik		Membuat SOP dan Menandatangani Pakta Integritas dan surat pernyataan bebas benturan kepentingan tentang penunjukan pihak ketiga dalam setiap kegiatan	Triwulan I, II, III, IV	-	
II	Risiko Strategis OPD									
6	Tidak tercapainya target perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.01	-	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Tidak tercapainya misi ke-V Kota Denpasar	-	Mendata kegiatan perlindungan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Triwulan I, II, III, IV	-	

7	Tidak tercapainya target pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.02	-	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Tidak tercapainya misi ke-V Kota Denpasar	-	Mendata kegiatan pengembangan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Triwulan I, II, III, IV	-	
8	Tidak tercapainya target pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.03	-	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Tidak tercapainya misi ke-V Kota Denpasar	-	Mendata kegiatan pemanfaatan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Triwulan I, II, III, IV	-	
9	Tidak tercapainya target pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	RSO.26.22.19.04	-	Tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai dengan dokumen Renstra	Tidak tercapainya misi ke-V Kota Denpasar	-	Mendata kegiatan pembinaan Kebudayaan yang ada pada Perangkat Daerah terkait	Triwulan I, II, III, IV	-	
III Risiko Operasional OPD										
10	Terjadinya perwakilan pemain yang sama tiap tahunnya dalam pementasan Drama Gong Duta Kota Denpasar pada Kegiatan PKB Tingkat Provinsi Bali	ROO.26.22.19.14	-	Kurangnya minat anak muda Denpasar untuk mendalami pakem Drama Gong (yang memerlukan penguasaan bahasa Bali alus dan akting klasik), sehingga stok pemain baru menjadi sangat terbatas	Hilangnya pementasan Drama Gong Duta Kota Denpasar pada Kegiatan PKB	-	Melakukan pembinaan kepada sekaa-sekaa / sanggar / komunitas yang ada di Kota Denpasar dalam pelestarian Drama Gong serta menyelenggarakan kompetisi Drama Gong Remaja secara rutin di tingkat kota untuk memicu lahirnya sekaa-sekaa baru	Triwulan I, II, III, IV	-	
11	Terjadinya kesalahan dalam penentuan pemenang lomba	ROO.26.22.19.15	-	Tidak ada prosedur pengecekan ulang (double-check) atau konfirmasi langsung kepada peserta saat pelanggaran tercatat	Panitia dianggap tidak profesional dan kredibilitas penyelenggara perlombaan akan dipertanyakan di masa mendatang	-	Memastikan panitia memahami jenis-jenis pelanggaran dan pengisian formulir secara detail sebelum acara dimulai, Setiap catatan pelanggaran harus ditandatangani oleh Panitia dan Peserta yang melakukan pelanggaran)	Triwulan I, II, III, IV	-	
12	Sulitnya memfasilitasi peserta lomba Parade Baleganjur Gerak	ROO.26.22.19.12	-	Keterbatasan anggaran bagi peserta yang ingin mengikuti lomba sehingga terkendala biaya latihan	antusiasme generasi muda untuk melestarikan seni Baleganjur gerak bisa terancam	-	Memberikan masukan kepada desa dalam Musrenbang untuk dapat mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pelestarian Seni dan Budaya	Triwulan I, II, III, IV	-	
13	Minimnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional (Seni Angkulng, Selonding, Gambang, Gambuh dan Semara Pegulingan)	ROO.26.22.19.13	-	Kurangnya ruang pembelajaran dan dukungan kebijakan yang konkret untuk revitalisasi seni di tingkat komunitas.	Terancam punahnya warisan budaya khususnya pada kesenian tradisional	-	Memfaatkan regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk pendanaan program pelatihan dan penyediaan fasilitas seni di tingkat desa	Triwulan I, II, III, IV	-	

14	Tidak sesuai Realisasi anggaran kegiatan dengan anggaran kas	ROO. 26.22.19.16	-	Peserta tidak responsif saat dihubungi untuk pengumpulan data	Terlambatnya realisasi anggaran kegiatan	-	Menginformasikan lebih awal untuk menyiapkan kelengkapan administrasi (Fc KTP dan Fc Buku Tabungan) pada (pemenang maupun peserta lomba	Triwulan I, II, III, IV	-	
15	Terjadinya hujan pada saat pelaksanaan pembukaan bulan bahasa bali	ROO. 26.22.19.07	-	Kegiatan Pembukaan bulan bahasa bali dilakukan di luar ruangan	Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali kurang maksimal	-	Pemindahan kursi dan meja undangan ke dalam wantilan	Triwulan I, II, III, IV	-	
16	Kurangnya minat pemilik Lontar untuk dilakukan Pelindungan/Pembersihan Lontar	ROO. 26.22.19.08	-	Kurangnya Sosialisasi terkait pelindungan lontar	Banyaknya lontar yang rusak	-	Melakukan Sosialisasi pelindungan lontar	Triwulan I, II, III, IV	-	
17	Rendahnya minat peserta dalam mengikuti pelatihan Pelindungan Bahasa Bali	ROO. 26.22.19.09	-	Kurangnya minat peserta dalam mengikuti pelatihan Pelindungan Bahasa Bali	Kurangnya pengetahuan terhadap bahasa, sastra dan aksara bali dalam masyarakat	-	Melakukan pembinaan akan pentingnya bahasa, sastra dan aksara bali	Triwulan I, II, III, IV	-	
18	Tidak dapat menentukan dengan pasti waktu pelaksanaan Pementasan Kesenian Hari-Hari Tertentu	ROO. 26.22.19.11	-	Tidak pastinya waktu Pelaksanaan Pementasan Kesenian Hari-Hari Tertentu	Tidak tercapainya target penyelenggaraan Pementasan Kesenian Hari-Hari Tertentu	-	Penyelenggaraan Pementasan Kesenian Hari-Hari Tertentu mengikuti arahan dari pimpinan	Triwulan I, II, III, IV	-	
19	Sulitnya menemukan atlet jantra yang kompeten	ROO. 26.22.19.17	-	Tidak adanya sosialisasi maupun ekstrakurikuler sekolah terkait permainan tradisional (Jantra) untuk menarik minat generasi muda	Sulitnya mencapai target juara di tingkat daerah maupun nasional	-	- Mengundang penggiat budaya atau komunitas permainan tradisional untuk memberikan workshop kepada guru dan siswa - Memasukkan Jantra ke dalam ekstrakurikuler sekolah	Triwulan I, II, III, IV	-	
20	Cuaca dan tempat yang kurang memadai	ROO. 26.22.19.18	-	Tidak dapat memprediksi cuaca pada saat perlombaan dan kurang besarnya tempat perlombaan karena peserta lomba yang sangat antusias	Pelaksanaan lomba menjadi tertunda dan ketidaknyamanan peserta lomba	-	Memantau perkiraan cuaca pada saat perlombaan dan membatasi jumlah peserta lomba per seri	Triwulan I, II, III, IV	-	

21	Tidak dapat menentukan dengan pasti waktu pelaksanaan Lomba Film Dokumenter (Perjalanan Dinas)	ROO. 26.22.19.19	-	Kurang jelasnya informasi terkait jadwal Lomba Film Dokumenter (Perjalanan Dinas)	Pelaksanaan Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat	-	Melakukan koordinasi beberapa bulan sebelumnya dengan penyelenggara kegiatan Lomba Film Dokumenter (Perjalanan Dinas)	Triwulan I, II, III, IV	-	
22	Adanya pergeseran nilai budaya terhadap Warisan Budaya Tak Benda	ROO. 26.22.19.20	-	Pengaruh budaya global dan perubahan gaya hidup masyarakat	Banyaknya Warisan Budaya Tak Benda yang tidak dapat dipertahankan atau dilestarikan keberadaannya	-	1. Pendekatan secara sistematis 2. Melakukan Sosialisasi	Triwulan I, II, III, IV	-	
23	Adanya perubahan destruktif (perubahan bentuk fisik akibat aktifitas manusia)	ROO. 26.22.19.21	-	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya	Banyaknya Cagar Budaya yang berubah bentuk dan berubah fungsi	-	1. Pendekatan secara sistematis 2. Melakukan Sosialisasi	Triwulan I, II, III, IV	-	
24	Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Denpasar sebagian besar masih difungsikan	ROO. 26.22.19.22	-	Kurangnya pemahaman pemilik akan pentingnya inventarisasi	Banyaknya Objek Cagar Budaya yang belum terdata, teridentifikasi, dan didokumentasikan dengan baik	-	1. Pendekatan secara sistematis 2. Melakukan Sosialisasi	Triwulan I, II, III, IV		
25	Nilai capaian Borang evaluasi PPKD menurun	ROO. 26.22.19.10	-	Tidak terlaksananya rekomendasi yang ada di dalam rekomendasi PPKD	Menurunnya kinerja Pemerintah Kota di Urusan Kebudayaan	-	Melakukan monitoring melalui borang identifikasi dan borang capaian	Triwulan I, II, III, IV	-	
26	Adanya keterlambatan pemberian gaji karena administrasi pendukung yang kurang lengkap (dalam hal ASN yang mengalami kenaikan pangkat)	ROO. 26.22.19.01	-	SK kenaikan pangkat yang terlambat sehingga proses administrasi menunggu SK turun	Gaji bagi ASN yang mengalami kenaikan pangkat menjadi tertunda	-	Melakukan rapel terhadap gaji pada bulan berikutnya	Triwulan I, II, III, IV	-	
27	Terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji	ROO. 26.22.19.02	-	2. Kesalahan perhitungan dalam pembuatan daftar gaji	Terganggunya proses pembayaran gaji pegawai	-	Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait pembuatan daftar gaji	Triwulan I, II, III, IV	-	

28	Anggaran yang kurang untuk memenuhi logistik kantor	ROO. 26.22.19.03	-	Kebutuhan melebihi anggaran yang ada	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan	-	Berkomunikasi dengan bidang untuk memperoleh data kebutuhan data logistik yang diperlukan setiap bidang	Triwulan I, II, III, IV	-	
29	Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal perencanaan	ROO. 26.22.19.04	-	Pengadaan Belanja Modal dilaksanakan melalui E-Katalog dan tidak semua barang ada etalase di E-Katalog atau spek barang yang dicari tidak ada di E-Katalog	Terhambatnya proses pengadaan barang	-	Melakukan sosialisasi kepada penyedia untuk mendaftarkan perusahaannya pada e-katalog	Triwulan I, II, III, IV	-	
30	Keterlambatan membayar tagihan listrik, telepon, air, membayar gaji pegawai, dan iuran BPJS	ROO. 26.22.19.05	-	1. Daftar amprahan gaji yang terlambat di tanda tangan sehingga menghambat proses administrasi dan kadaluarsanya cetakan tagihan pada aplikasi simponi 2. DPA yang agak telat ditetapkan di awal tahun sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran listrik, air, telepon	Terlambatnya membayar gaji pegawai, iuran BPJS Kesehatan dan pembayaran listrik, air, telepon	-	1. Mencari tanda tangan lebih awal sehingga proses administrasi tidak terhambat 2. Mengajukan surat permakluman ke PLN, PDAM, PT. TelKOM agar tidak melakukan penyeselatan atas keterlambatan pembayaran dan melakukan pembayaran setelah DPA terbit	Triwulan I, II, III, IV	-	
31	Realisasi anggaran kegiatan tidak bisa terealisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah dirancang	ROO. 26.22.19.06	-	Kerusakan barang tidak dapat diprediksi/ tidak dapat ditentukan kapan barang tersebut harus dilakukan service	Serapan anggaran tidak sesuai dengan rencana	-	Melakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi barang	Triwulan I, II, III, IV	-	
IV Risiko Fraud OPD										
32	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.1 3	-	1. Adanya tekanan atau pengaruh (lobby) dari penyedia dalam pengadaan belanja Barang dan Jasa 2. Dalam menyusun perencanaan pengadaan tidak melakukan survey pasar dan tidak adanya info harga pembandingan	Kerugian Keuangan Negara	-	Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	

33	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah kepada masyarakat di Bidang Kesenian	RF.26.22.19.1 4	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
34	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.1 5	-	1. Adanya tekanan atau pengaruh (loby) dari penyedia dalam pengadaan belanja Barang dan Jasa 2. Dalam menyusun perencanaan pengadaan tidak melakukan survey pasar dan tidak adanya info harga pembandingan	Kerugian Keuangan Negara	-	Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
35	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang tidak benar dalam penyaluran hibah dan BKK kepada masyarakat di Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	RF.26.22.19.1 6	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
36	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.1 7	-	1. Adanya tekanan atau pengaruh (loby) dari penyedia dalam pengadaan belanja Barang dan Jasa 2. Dalam menyusun perencanaan pengadaan tidak melakukan survey pasar dan tidak adanya info harga pembandingan	Kerugian Keuangan Negara	-	Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
37	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.1 8	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
38	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.1 9	-	1. Adanya tekanan atau pengaruh (loby) dari penyedia dalam pengadaan belanja Barang dan Jasa 2. Dalam menyusun perencanaan pengadaan tidak melakukan survey pasar dan tidak adanya info harga pembandingan	Kerugian Keuangan Negara	-	Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	

39	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.2 0	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
40	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya	RF.26.22.19.2 1	-	1. Adanya tekanan atau pengaruh (loby) dari penyedia dalam pengadaan belanja Barang dan Jasa 2. Dalam menyusun perencanaan pengadaan tidak melakukan survey pasar dan tidak adanya info harga pembandingan	Kerugian Keuangan Negara	-	Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
41	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya	RF.26.22.19.2 2	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
42	Pernyataan palsu pegawai terkait tunjangan yang diterima	RF.26.22.19.0 1	-	1) Lemahnya pengawasan 2) Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Daerah	-	Updating data Kepegawaian secara berkala	Triwulan I, II, III, IV	-	
43	Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.22.19.0 2	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan rutin	-	Melakukan himbauan berkala kepada seluruh pegawai terkait administrasi yang harus dilaksanakan dalam hal gaji/pendapatan pegawai	Triwulan I, II, III, IV	-	
44	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.26.22.19.0 3	-	1. Adanya tekanan atau pengaruh (loby) dari penyedia dalam pengadaan belanja Barang dan Jasa 2. Dalam menyusun perencanaan pengadaan tidak melakukan survey pasar dan tidak adanya info harga pembandingan	Kerugian Keuangan Negara	-	Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	

45	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RF.26.22.19.0 4	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada dengan melakukan ttd atau paraf berjenjang	Triwulan I, II, III, IV	-	
46	Pengadaan aset baru secara fiktif yaitu melakukan pengadaan dengan bukti barang yang tidak dibeli atau bukti barang yang lama	RF.26.22.19.0 5	-	Tidak digunakannya data real kebutuhan barang berdasarkan inventory aset	Kerugian Keuangan Negara	-	Pengawasan atas Aset	Triwulan I, II, III, IV	-	
47	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RF.26.22.19.0 6	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
48	Mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan / keadaan yang sebenarnya	RF.26.22.19.0 7	-	1. Lemahnya pengawasan 2. Kurang cermatnya verifikasi dalam RKBMD	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja	-	Penelitian dan/atau pencermatan penyusunan anggaran secara berjenjang dan berkala	Triwulan I, II, III, IV	-	
49	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.26.22.19.0 8	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
50	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.26.22.19.0 9	-	1. Adanya tekanan atau pengaruh (loby) dari penyedia dalam pengadaan belanja Barang dan Jasa 2. Dalam menyusun perencanaan pengadaan tidak melakukan survey pasar dan tidak adanya info harga pembandingan	Kerugian Keuangan Negara	-	Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	

51	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RF.26.22.19.10	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
52	Potensi Suap Menyuap dalam pemilihan rekanan dalam pengadaan Belanja Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.11	-	1. Adanya tekanan atau pengaruh (loby) dari penyedia dalam pengadaan belanja Barang dan Jasa 2. Dalam menyusun perencanaan pengadaan tidak melakukan survey pasar dan tidak adanya info harga pembandingan	Kerugian Keuangan Negara	-	Belanja Barang dan Jasa metode e-purchasing	Triwulan I, II, III, IV	-	
53	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	RF.26.22.19.12	-	1. Bukti administratif mudah dimanipulasi, 2. Lemahnya pengawasan, 3. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, 4. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Kerugian Keuangan Negara	-	Melakukan pengawasan atas bukti-bukti pengeluaran yang ada	Triwulan I, II, III, IV	-	
Masalah/Risiko Baru:										

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



Drs. Raka Purwantara, M.A.F.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720219 199101 1 002



